



JILID 2

Isu Kontemporer Akuntansi Publik

Dr. Harnovinsah, SE., Ak., M. Si., CA., Cert,IPSAS., CMA., CSRS

Dr. Ana Sopanah, SE., Ak., M.Si., CA., CMA

Dr. Rida Perwita Sari, SE., Ak., M.Aks., CA, CPA



BAB 10

*Analisis Kinerja Finansial Pemerintahan
Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan
Analisis Jalur*

(VERAWATY, NINA YUDISIA MARIATI, M. IBRAHIM FIKRI)

BAB X

ANALISIS KINERJA FINANSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN: PENDEKATAN ANALISIS JALUR

Verawaty¹, Nina Yudisia Mariati², M. Ibrahim Fikri³

(1) Universitas Bina Darma

(2) Universitas Bina Darma

(3) BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah tidak terlepas dari manajemen pengelolaan keuangannya karena keuangan daerah merupakan urat nadi keberlangsungan pemerintahan dan aktivitas pokok yang sangat mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Dengan diterapkannya penyusunan anggaran berbasis kinerja berarti semua kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan pada *output* bukan lagi pada *input*. Anggaran semacam ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dengan menerapkan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efektif dan efisien sehingga kinerja pemerintah daerah lebih mudah diukur berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, daerah harus menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah apa sudah dilakukan secara efisien dan efektif. Dalam akuntansi pemerintahan (Verawaty, dkk, 2014), manajemen keuangan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan daerah karena apabila daerah tersebut dapat memaksimalkan APBD yang ada, maka akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan turut menurunkan tingkat kemiskinan. Pengelolaan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Sumatera Selatan sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan potensi pendapatan daerahnya guna mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan.

Kinerja finansial di Sumatera Selatan di tahun 2015, 2016, dan 2017 yang dilihat dari pendapatan dalam anggaran APBD mengalami kenaikan di tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan mengalami peningkatan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang dilihat dari BPS, dimana tingkat pengangguran di tahun 2016 hanya sebesar 4,31% mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 6,07% artinya mengalami penurunan sebesar 1,76% tetapi di tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,08% menjadi sebesar 4,39%. Berbeda dengan tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan setiap tahunnya tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar untuk tingkat kemiskinan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengertian kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja finansial adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja finansial pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Verawaty (2014) menyimpulkan bahwa akuntabilitas atas suatu anggaran yang meningkat, pemerintah daerah pasti akan menghadapi peningkatan permintaan untuk memantau informasi dan insentif yang lebih besar untuk memberi sinyal kinerja.

Kinerja finansial dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, desentralisasi fiskal, dan lainnya. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang akan dibahas, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan sebagai kajian ranah akuntansi pemerintahan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menjalin suatu hubungan, dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak kedua disebut agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen, sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal (Nugroho dan Rohman, 2012).

Menurut Halim dan Abdullah (2006), teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Menurut Andvig, dkk (2001), *principal-agent model* merupakan kerangka analitis yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yaitu (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan

dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsip saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Jadi tujuan prinsip harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera.

Verawaty (2017) meyakini bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Model agen prinsip merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni terdapat beberapa prinsip dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan prinsip juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsip saja.

Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan maka *agency theory* menekankan bahwa dengan adanya kebijakan dari pemerintah provinsi sebagai agen kepada prinsipalnya, yaitu pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah yang diberikan wewenang dalam membuat keputusan dapat menggunakan bagi kehidupan orang banyak di daerahnya. Pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian di daerahnya dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, mengurangi jumlah pengangguran, dan kemiskinan yang menurun.

Kinerja Finansial

Keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Namun Halim (2013) mengemukakan bahwa usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja finansial ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan rasio DSCR.

Menurut Sedarmayanti (2003), kinerja diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja finansial pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut Halim (2012), analisis kinerja finansial adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Adapun menurut Verawaty (2017), kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah

serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat merupakan salah satu tolak ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja finansial ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, dan desentralisasi fiskal.

Hubungan Rasio Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Menurut Verawaty (2017), tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi masyarakat yang sadar membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan meningkat, mengurangnya jumlah pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah dilakukan oleh Hamzah (2008), Ani dan Dwirandra (2014), Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), Yani (2014), dan Sari, dkk (2016), menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008) dan Yani (2014), rasio kemandirian berpengaruh terhadap pengangguran, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Dwirandra (2014) dan Nurulita, dkk (2014), rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008), Ani dan Dwirandra (2014), dan Yani (2014), rasio kemandirian berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hubungan Rasio Efektivitas, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Menurut Sudrajat dan Sukmasari (2011), efektif dapat berarti kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Dengan demikian efektif berkaitan antara *output* dengan tujuannya pemerintah untuk menyediakan pelayanan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah efektivitas bisa diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan anggarannya. Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan yang dicapai oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), Yani (2014), dan Sari, dkk (2014), menunjukkan hasil bahwa efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda menurut Hamzah (2008), Ani dan Dwirandra (2014), dan Nurulita, dkk (2018), efektivitas tidak pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan yang dilakukan Hamzah (2008), Nurulita, dkk (2014), dan Yani (2014), berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014), rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Penelitian yang dilakukan Hamzah (2008), Ani dan Dwirandra (2014), dan Yani (2014), rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Hubungan Rasio Efisiensi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Menurut Halim (2012), rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam hal ini meng-
asumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Dari perbandingan tersebut berarti semakin kecil rasio efektivitas maka organisasi dikatakan semakin efisien.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Hamzah (2008), Nurulita, dkk (2018), Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), dan Yani (2014), menunjukkan hasil bahwa efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Ani dan Dwirandra (2014), efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hamzah (2008) dan Yani (2014), rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap Pengangguran. Berbeda dengan Ani dan Dwirandra (2014) dan Nurulita, dkk (2014), rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hamzah (2008) dan Yani (2014), rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Berbeda dengan Ani dan Dwirandra (2014), rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hubungan Rasio Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Menurut Halim (2012), untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, PAD, dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya positif. Hal ini berarti bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yani (2014), rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Dwirandra (2014), rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Yani (2014) berpengaruh positif terhadap pengangguran. Berbeda dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014), rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Yani (2014), rasio pertumbuhan PAD

berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014), rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Menurut Ginting dan Rasbin (2010) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan PDRB ril. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurut Verawaty, dkk (2015), semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber dana. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.

Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparatur daerah secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut Hamzah (2008).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hamzah (2008), dan Sudrajat dan Sukmasari (2011), pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Astuti (2015), bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita, dkk (2014), pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hamzah (2008), Astuti (2015), dan Sudrajat dan Sukmasari (2011), pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan yang tidak konsisten.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Data yang digunakan, yaitu data sekunder berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta realisasinya tahun 2015-2017 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan, data pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan tahun 2015 hingga 2017 yang terdapat di *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Penarikan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sampling jenuh/sensus. Berikut ini deskripsi penarikan sampel penelitian:

Tabel 1
Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Frekuensi
1	Merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017	17	100%
2	Tidak memiliki laporan keuangan tahun 2015-2017	(0)	0%
3	Tidak memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai variabel-variabel yang diteliti	(0)	0%
Jumlah Sampel Penelitian		17	100%
Periode Penelitian (Tahun)		3	-
Data Outlier		8	47,05%
Total		43	52,95%

Sumber: Data diolah, 2019

Teknik Analisis

Pemilihan teknik analisis kuantitatif adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan tiga perumusan hipotesis. Adapun persamaan model regresi linier berganda dalam analisis substuktural sebagai berikut:

Persamaan Substruktural I

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Persamaan Substruktural II

$$Y_3 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Persamaan Substruktural III

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Y_2 + \beta_6 Y_3 + e$$

Keterangan:

Y_1 = Pertumbuhan ekonomi

Y_2 = Pengangguran

Y_3 = Kemiskinan

X_1 = Rasio Kemandirian

X_2 = Rasio Efektivitas

X_3 = Rasio Efisiensi

X_4 = Rasio Pertumbuhan PAD

e = error

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda atau analisis jalur adalah perluasan analisis regresi untuk menaksir hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2016).

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 Y_2 X_1 + \beta_2 Y_2 X_2 + \beta_3 Y_2 X_3 + \beta_4 Y_2 X_4 + e$$

$$Y_3 = \alpha + \beta_1 Y_3 X_1 + \beta_2 Y_3 X_2 + \beta_3 Y_3 X_3 + \beta_4 Y_3 X_4 + e$$

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 Y_1 X_1 + \beta_2 Y_1 X_2 + \beta_3 Y_1 X_3 + \beta_4 Y_1 X_4 + \beta_5 Y_1 Y_2 + \beta_6 Y_1 Y_3 + e$$

Menurut Ghozali (2016), jika nilai z hitung > nilai z tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. Dengan metode *Product of Coefficient* menggunakan metode Uji Sobel dapat dilakukan dengan cara melihat t hitung. Nilai t hitung dapat diperoleh dengan membandingkan perkalian koefisien regresi pada persamaan I dan II (koefisien a) dan pada persamaan III (koefisien b) dengan standar *error ab* (*sab*):

$$T = \frac{ab}{S_{ab}}$$

$$S_{ab} = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik, baik uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Dengan demikian semua variabel penelitian bisa diuji pada tahapan selanjutnya. Berikut tabel analisis regresi untuk persamaan substuktural I:

Tabel 2
Analisis Regresi untuk Persamaan Substruktural I

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,357	3,656		-1,192	,241
	Rasio Kemandirian	9,967	4,737	,351	2,104	,042
	Rasio Efektivitas	1,963	1,794	,185	1,095	,281
	Rasio Efisiensi	5,089	3,465	,219	1,469	,150
	Rasio Pertumbuhan PAD	-,439	,793	-,083	-,553	,583
	Pertumbuhan Ekonomi	34,326	22,830	,226	1,504	,141

a. Dependent Variable: Pengangguran

Sumber: Data diolah, 2019

Setelah melakukan analisis regresi persamaan substuktural I dari tabel di atas, maka nilai nilai koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi substuktural I sebagai berikut:

$$Y_1 = -4,357 + 9,967X_1 + 1,963X_2 + 5,089X_3 - 0,439X_4 + 34,326Y_1 + e$$

Berikut tabel analisis regresi untuk persamaan substruktural II:

Tabel 3
Analisis Regresi untuk Persamaan substruktural II

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	14,941	4,596		3,251	,002
	Rasio Kemandirian	-1,385	5,955	-,036	-,233	,817
	Rasio Efektivitas	-3,005	2,255	-,207	-1,333	,191
	Rasio Efisiensi	7,910	4,356	,248	1,816	,078
	Rasio Pertumbuhan PAD	,755	,997	,104	,757	,454
	Pertumbuhan Ekonomi	-117,002	28,700	-,561	-4,077	,000

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Data diolah, 2019

Setelah melakukan analisis regresi persamaan substruktural II dari tabel di atas, maka nilai nilai koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi substruktural II sebagai berikut:

$$Y_3 = 14,941 - 1,385X_1 - 3,005X_2 + 7,910X_3 + 0,755X_4 - 117,002Y_1 + e$$

Berikut tabel analisis regresi untuk persamaan substruktural III:

Tabel 4
Analisis Regresi untuk Persamaan substruktural III

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,076	,021		3,550	,001
	Rasio Kemandirian	-,026	,029	-,138	-,900	,374
	Rasio Efektivitas	-,021	,010	-,300	-2,053	,047
	Rasio Efisiensi	,023	,021	,153	1,141	,261
	Rasio Pertumbuhan PAD	,004	,005	,129	,987	,330
	Pengangguran	,002	,001	,296	2,128	,040
	Kemiskinan	-,003	,001	-,570	-4,399	,000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data diolah, 2019

Setelah melakukan analisis regresi persamaan substruktural III dari tabel di atas, maka nilai-nilai koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi substruktural III sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,076 - 0,026X_1 - 0,021X_2 + 0,023X_3 + 0,004X_4 + 0,002Y_2 - 0,003Y_3 + e$$

Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan dari analisis regresi linear berganda. Berdasarkan data yang ada pada penelitian ini maka nilai-nilai koefisien jalur beta dari hasil uji analisis persamaan substruktural pertama, persamaan substruktural kedua, dan persamaan substruktural ketiga, sehingga pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*), dan pengaruh total (*total effect*) seperti pada tabel 4.24 sebagai berikut.

Tabel 5
Pengaruh Variabel Pada Analisis Jalur

Jalur	Pengaruh langsung (<i>direct effect</i>)	Pengaruh tidak langsung (<i>indirect effect</i>)	Pengaruh Total (<i>total effect</i>)	Keterangan
X1 → Y2	0,351		0,351	
X2 → Y2	0,185		0,185	
X3 → Y2	0,219		0,219	
X4 → Y2	-0,083		-0,083	
X1 → Y3	-0,036		-0,036	
X2 → Y3	-0,207		-0,207	
X3 → Y3	0,248		0,248	
X4 → Y3	0,104		0,104	
X1 → Y1	-0,138		-0,138	
X2 → Y1	-0,300		-0,300	
X3 → Y1	0,153		0,153	
X4 → Y1	0,129		0,129	
Y2 → Y1	0,296		0,296	
Y3 → Y1	-0,570		-0,570	
X1 → Y2 → Y1	-0,138	0,103896	-0,014337648	
X2 → Y2 → Y1	-0,300	0,05476	-0,016428	
X3 → Y2 → Y1	0,153	0,064824	0,009918072	
X4 → Y2 → Y1	0,129	-0,024568	-0,003169272	
X1 → Y3 → Y1	-0,138	0,02052	-0,00283176	
X2 → Y3 → Y1	-0,300	0,11799	-0,035397	
X3 → Y3 → Y1	0,153	-0,14136	-0,02162808	
X4 → Y3 → Y1	0,129	-0,05928	-0,00764712	

Signifikan atau tidak pengaruh mediasi dapat diuji dengan Metode *Product of Coefficient*. Metode *Product of Coefficient* dapat dilakukan dengan menggunakan uji sobel. Hasil uji *sobel test* memberikan nilai estimasi *indirect effect* yang kemudian dicari nilai z hitungnya dengan cara membagi besarnya nilai data terhadap nilai *standar error* dan membandingkan dengan z tabel sebesar 1,96.

$$z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2}$$

Hasil sobel test pada penelitian ini seperti pada tabel 4.24 sebagai berikut:

**Tabel 6
Hasil Sobel Test**

	Z hitung P	Z hitung K
Rasio Kemandirian	94,23	11,65
Rasio Efektivitas	196,84	150,55
Rasio Efisiensi	118,45	-94,05
Rasio Pertumbuhan PAD	-263,11	-215,51

Sumber: Data diolah, 2019

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel rasio kemandirian sebesar 0,374 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil Hamzah (2008), Ani dan Dwirandra (2014), Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), Yani (2014), dan Sari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Nurulita, dkk (2018) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio kemandirian adalah perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dan menunjukkan daerah mana yang mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Masalah dalam penelitian ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian memiliki arah hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, berarti ketika rasio kemandirian tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan rendah. Rasio kemandirian yang rendah juga menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan

demikian, hipotesis 1a yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio kemandirian dan pengangguran didapatkan hasil z hitung yaitu 94,23 lebih besar dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio kemandirian dan pengangguran. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yani (2014) namun berbeda dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014) dan Nurulita, dkk (2014) bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa PAD yang ditunjang dari pembayaran pajak dan retribusi, dimana daerah memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang mampu meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi berkembang dengan baik. Dengan demikian hipotesis 1b pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio kemandirian dan pengangguran diterima.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio kemandirian dan kemiskinan didapatkan hasil z hitung yaitu 11,65 lebih besar dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio kemandirian dan kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yani (2014) namun berbeda dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya sumbangan PAD terhadap bantuan pemerintah dan pinjaman akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian hipotesis 1c pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio kemandirian dan kemiskinan diterima.

Pengaruh Rasio Efektivitas, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel rasio efektivitas sebesar 0,047 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis ini sejalan dengan hasil Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), Yani (2014), dan Sari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan hasil penelitian Hamzah (2008), Ani dan Dwirandra (2014), dan Nurulita, dkk (2018) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam realisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan sesuai dengan anggaran yang ditargetkan. Rasio efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, suatu daerah dikatakan efektif jika mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak.

Masalah dalam penelitian ini disebabkan karena realisasi penerimaan pemerintah daerah dibandingkan dengan target kurang memenuhi ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*), hampir seluruh kabupaten/kota mempunyai realisasi APBD yang tidak efektif, karena perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pendapatan diperoleh nilai 90% ke atas, bahkan ada yang 100% ke atas, dimana hal ini menandakan bahwa kabupaten/kota tersebut tidak efektif dalam kinerja finansialnya. Dengan demikian, hipotesis 2a yang menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efektivitas dan pengangguran didapatkan hasil z hitung yaitu 196,84 lebih besar dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efektivitas dan pengangguran. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Nurulita, dkk (2014) dan Yani (2014) namun berbeda dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014) bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PAD dari yang ditargetkan mampu mendorong pengembangan program-program yang dapat dialokasikan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan demikian hipotesis 2b pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efektivitas dan pengangguran diterima.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efektivitas dan kemiskinan didapatkan hasil z hitung yaitu 150,55 lebih besar dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efektivitas dan kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yani (2014) namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa daerah dengan nilai rasio efektivitas yang tinggi, berarti daerah tersebut sudah dapat mengoptimalkan kemampuan daerahnya dalam memperoleh penerimaan. Maka daerah dengan kemampuan optimal akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian hipotesis 2c pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efektivitas dan kemiskinan diterima.

Pengaruh Rasio Efisiensi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel rasio efisiensi sebesar 0,261 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil Hamzah (2008), Astuti (2015), Sudrajat dan Sukmasari (2011), Yani (2014), dan Sari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Ani dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio efisiensi adalah perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja finansial dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin tinggi rasio efisiensi berarti kinerja finansial daerah semakin baik.

Masalah dalam penelitian ini disebabkan karena total realisasi belanja daerah untuk lebih besar daripada anggaran belanja daerah yang menyebabkan terjadi kekurangan dan tidak dapat dialokasikan untuk belanja publik, sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 3a yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efisiensi dan pengangguran didapatkan hasil z hitung yaitu 118,45 lebih besar dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efisiensi dan pengangguran. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yani (2014) namun berbeda dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014) dan Nurulita, dkk (2014) bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa total realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah dapat dialokasikan lebih efisien sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dengan demikian hipotesis 3b pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efisiensi dan pengangguran diterima.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efisiensi dan kemiskinan didapatkan hasil z hitung yaitu -94,05 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengintervensi hubungan antara rasio efisiensi dan kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yani (2014) namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ani dan Dwirandra (2014) bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk memperoleh pendapatannya lebih besar, dimana hal tersebut menyebabkan kurang efisennya pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Sehingga penerimaan pendapatan yang semestinya dapat melebihi dari pengeluaran tidak dapat digunakan untuk membantu meningkatkan program-program dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian hipotesis 3c pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efisiensi dan kemiskinan ditolak.

Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel rasio pertumbuhan PAD sebesar 0,330 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa rasio pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil Yani (2014) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Ani dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio pertumbuhan PAD adalah perbandingan antara PAD tahun sekarang dan PAD tahun sebelumnya dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan PAD berguna untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau dalam satu periode anggaran, kinerja finansial APBD mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif atau negatif. Pertumbuhan ekonomi diharapkan secara positif yang akan berarti kecenderungannya meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan PAD secara negatif, maka terjadi penurunan kinerja finansial PAD. Rasio pertumbuhan PAD sangat berguna bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi daerah mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Hasil penelitian Verawaty, dkk (2020) menyatakan terdapat pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. Hal ini menunjukkan semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika PAD naik, maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota naik (meningkat). Namun masalah dalam penelitian ini disebabkan tingkat pertumbuhan PAD pada periode penelitian ini tidak berhasil karena di bawah 30%. Dengan demikian, hipotesis 4a yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio pertumbuhan PAD dan pengangguran didapatkan hasil z hitung yaitu -263,11 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengintervensi hubungan antara rasio pertumbuhan PAD dan pengangguran. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yani (2014) namun berbeda dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014) bahwa rasio pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa PAD tidak mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan infrastruktur usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak pengangguran. Dengan demikian hipotesis 4b pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio pertumbuhan PAD dan pengangguran ditolak.

Pada uji sobel untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio pertumbuhan PAD dan kemiskinan didapatkan hasil z hitung yaitu -215,51 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengintervensi hubungan antara rasio pertumbuhan PAD dan kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014) namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yani (2014) bahwa rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa PAD tidak mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan program-program dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian hipotesis 4c pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio pertumbuhan PAD dan kemiskinan ditolak.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,141 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil Hamzah (2008), Astuti (2015), dan Sudrajat dan Sukmasari (2011) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Nurulita, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan atas harga konstan. Ada tiga aspek dalam pertumbuhan ekonomi yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses berarti pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total dan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang berarti kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Keberhasilan perekonomian diukur dengan indikator yaitu indikator pendapatan nasional riil, indikator pendapatan riil per kapita, indikator kesejahteraan penduduk, dan indikator tenaga kerja dan pengangguran.

Masalah dalam penelitian ini disebabkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdasarkan angka-angka makro saja, seperti tingkat inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, Indeks Harga Saham Gabungan (HSG) yang menguat dan lain-lain, sedangkan pada sektor riil khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang berkembang dan berdaya sehingga kurang atau tidak menyerap jumlah pengangguran. Dengan demikian, hipotesis 5a yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran ditolak.

Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Hamzah (2008), Nurulita, dkk (2018), dan Astuti (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi semakin berkurang tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, hipotesis 5b yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis kinerja finansial terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan: pendekatan analisis jalur dengan studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan variabel independen rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan PAD, maka disimpulkan, yaitu *Pertama*: Berdasarkan hasil dari uji hipotesis rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal ini dikarenakan kurangnya pendapatan asli daerah yang menyebabkan masih sangat membutuhkan campur tangan pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio kemandirian dan pengangguran diterima, berarti rasio kemandirian dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan melalui pertumbuhan ekonomi karena PAD yang ditunjang dari pembayaran pajak dan retribusi, dimana daerah memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang mampu meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio kemandirian dan kemiskinan diterima, berarti rasio kemandirian dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi karena semakin besarnya sumbangan PAD terhadap bantuan pemerintah provinsi dan pusat serta pinjaman akan menurunkan tingkat kemiskinan. *Kedua:* Berdasarkan hasil dari uji hipotesis rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pemerintah daerah dibandingkan dengan target kurang memenuhi ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*), hampir seluruh kabupaten/kota mempunyai realisasi APBD yang tidak efektif, karena perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pendapatan diperoleh nilai 90% ke atas, bahkan ada yang 100% ke atas. Pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efektivitas dan pengangguran diterima, berarti rasio efektivitas dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi karena realisasi penerimaan PAD dari yang ditargetkan mampu mendorong pengembangan program-program yang dapat dialokasikan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efektivitas dan kemiskinan diterima, berarti rasio efektivitas dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi karena realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan targetnya penerimaan PAD lebih besar untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga: Berdasarkan hasil dari uji hipotesis rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi belanja dan anggaran belanja terjadi kekurangan dan tidak dapat dialokasikan untuk belanja publik sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efisiensi dan pengangguran diterima, berarti rasio efisiensi dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi karena total realisasi belanja daerah dan anggaran belanja daerah dapat dialokasikan lebih efisien sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio efisiensi dan kemiskinan ditolak, berarti rasio efisiensi tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran pemerintah untuk memperoleh pendapatannya lebih besar, dimana hal tersebut menyebabkan kurang efisiennya pengeluaran yang dilakukan pemerintah sehingga penerimaan pendapatan yang mestinya melebihi dari pengeluaran tidak dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. *Keempat:* Rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak. Hal ini dikarenakan pertumbuhan PAD di bawah 30% yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Selatan tidak berhasil. Pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio pertumbuhan PAD dan pengangguran ditolak, berarti rasio pertumbuhan PAD tidak dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi karena PAD tidak mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan infrastruktur usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja yang mengakibatkan lebih banyak pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mengintervensi hubungan antara rasio pertumbuhan PAD dan kemiskinan ditolak, berarti rasio pertumbuhan PAD tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi karena PAD tidak mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan program-program dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kelima: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran ditolak. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang berkembang dan berdaya sehingga kurang atau tidak menyerap jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan diterima. Hal ini dikarenakan semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi semakin berkurang tingkat kemiskinan. Keberhasilan perekonomian diukur dengan indikator yaitu indikator pendapatan nasional riil, indikator pendapatan riil per kapita, indikator kesejahteraan penduduk, dan indikator tenaga kerja dan pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andvig, J.C., Fjeldstad, O-H., Amundsen, I., Sissener, T., & Søreide, T. (2001). *Corruption. A Review of Contemporary Research*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R.
- Ani, N.L.N.P & Dwirandra, A.A.N.B (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3): 481-497.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, 6(1): 1-18.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ginting, A.M. & Rasbin. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(1): 279-312.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- (2013). *Analisis Investasi*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A. & Syukriy, A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1): 53-64.
- Hamzah, A. (2008). *Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*. Simposium Nasional

- Akuntansi XI, Pontianak, 23-26 Juli 2008.
- Nugroho, F. & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2): 1-14.
- Nurulita, S., Hamdani, A., & Yefni, Y. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3): 336-356.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sari, G.N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T.O. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(2): 1-19.
- Sedarmayanti. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Ilham Jaya: Bandung.
- Sudrajat & Sukmasari, D. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *The Journal of Accounting and Finance*, 16(1): 62-72.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Verawaty. (2014). The Accessibility Determinants of Internet Financial Reporting of Local Government: Further Evidence from Indonesia. *World Review of Business Research*, 4(2): 176-195.
- Verawaty, Merina, C.I., & Sari, M. (2015). *Determinan Pengalokasian Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA XVIII), USU, Medan Sumut, 16-19 September 2015.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *MBiA*, 16(1): 1-10.
- Verawaty. (2017). *Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis*. Lambert Academic Publishing: Germany.
- Verawaty, Jaya, A.K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBiA*, 19(1): 21-37.
- Yani, P.A. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2006-2011)*. Universitas Bangka Belitung.